

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Keaslian Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Kewenangan	19
B. Pemerintah	26
B.1. Pemerintah	26
B.2. Pemerintah dalam Pembentukan Undang-Undang	30
C. Otonomi Daerah	35

D. Pengawasan	44
E. Daerah Otonom.....	50
F. Pemekaran Daerah	52
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Pendekatan Penelitian	58
B. Jenis Penelitian.....	59
C. Jenis Data	60
D. Cara dan Alat Pengumpul Data	62
E. Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Perbedaan Pengaturan Kewenangan Pemerintah dalam Pembentukan Daerah Otonom Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	66
A.1. Pengaturan Pembentukan Daerah Otonom menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.....	67
A.2. Pengaturan Pembentukan Daerah Otonom menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	71
A.3. Perbedaan Substansial antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berkaitan dengan Pengaturan Kewenangan Pemerintah dalam Pembentukan Daerah	83
A.3.1. Pergeseran Paradigma : Pemekaran ke Penataan	83
A.3.2. Pengaturan Pendelegasian Kewenangan yang Rigid	89
A.3.3. Kompleksitas Proses Pembentukan Daerah	97

A.3.4. Perluasan Usul Penggabungan Daerah	102
A.3.5. Desain Besar Penataan Daerah.....	106
B. Pergeseran Kewenangan Pemerintah dalam Pembentukan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	108
B.1. Penataan Kewenangan Lembaga-Lembaga Pembentuk Daerah ..	114
B.2. Pergeseran Kewenangan Pemerintah sebagai <i>Open Legal Policy</i>	119
B.3. Pergeseran Kewenangan Pemerintah Sesuai dengan Pertimbangan <i>Maximum Minimorum</i>	124
C. Pengawasan terhadap Kewenangan Pemerintah dalam Pembentukan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	127
C.1. Pengawasan Administratif.....	127
C.2. Pengawasan Lembaga Politik.....	132
C.3. Pengawasan Yudisial.....	138
BAB V PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	147

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan antar Cara Perolehan Kewenangan oleh Pemerintah	33
Tabel 2. Rincian Pasal dan Jumlah Ayat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus	71
Tabel 3. Penjelasan Syarat Administratif, Syarat Teknis, dan Syarat Teknis dalam Pembentukan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	73
Tabel 4. Jumlah Pasal dan Ayat yang mengatur mengenai Pembentukan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	76
Tabel 5. Perincian persyaratan Pembentukan Daerah Persiapan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah	78